

ABSTRAK

Ervin Widi Saputra, 12103183146, Disharmoni Pengaturan Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Yang Di Gunakan Sebagai Lahan Perkebunan Antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Tulungagung 2024, Pembimbing Fahmi Arif, S.H., M.H.

Kata Kunci : Disharmoni, Pembakaran Hutan, Perkebunan, Lingkungan Hidup.

Hutan sangat berperan penting bagi kehidupan manusia, karena itu manusia sangat memerlukan produk yang dihasilkan oleh hutan. Akan tetapi akhir-akhir ini hutan dan rawa gambut di Indonesia mengalami degradasi (penurunan suatu kualitas) dan juga deforestasi (kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar) serta penghilangan hutan akibat pembukaan hutan sebagai lahan perkebunan dengan jumlah yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan. Dampak negatif dari kebakaran hutan yang sangat dirasakan manusia ialah berkurangnya manfaat dari potensi hutan seperti manfaat pepohonan yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan juga obat-obatan, serta kurangnya ketersediaan udara bersih dan segar yang dihasilkan oleh vegetasi hutan. Lalu hilangnya fungsi hutan sebagai tata air dan pencegah terjadinya erosi.

Rumusan masalah didalam pembahasan ini adalah :

- 1). Bagaimana disharmonisasi aturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup ?
- 2). Bagaimana idealnya pengaturan sanksi pidana dalam aktifitas pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan ?

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Sifat penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi. Penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan, yang berarti penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mencari pendapat-pendapat serta teori-teori yang relevan dengan tindak pidana terhadap “Disharmoni Pengaturan Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Sebagai Lahan Perkebunan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dokumentasi dengan meneliti sumber-sumber data tertulis, yaitu: buku-buku hukum tata negara, undang-undang, jurnal hukum dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ;

1). Di undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan pasal 56 ayat 1 disebutkan “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara membakar” di ayat 2 disebutkan “setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan” serta di pasal 108 disebutkan “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan membakar dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling banyak 10 (sepuluh) miliar”. Di undang-undang tersebut kurang spesifik menjelaskan tentang bagaimana pengaturan pelarangan pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan, bila dibandingkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 69 ayat 1 huruf a disebutkan “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” dan di pasal 69 ayat 1 huruf h disebutkan “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” lalu di pasal 69 ayat 2 disebutkan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing” lalu di pasal 108 disebutkan “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dikenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 3 (tiga) miliar dan denda paling banyak 10 (sepuluh) miliar”. Dari undang-undang tersebut dapat dilihat secara spesifik bagaimana pengaturan larangan

pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan serta penetapan sanksi pidana batasan minimum dan maksimum terhadap pelaku pelanggaran.

2). Jika dilihat dari fungsi dan tujuan dari kedua undang-undang tersebut, maka Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 pasal 56 ayat 1 jo pasal 108 tentang perkebunan masih kurang relevan jika digunakan sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 69 ayat 1 huruf a dan huruf h serta pasal 69 ayat 2 jo pasal 108 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih lebih baik digunakan sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran, yang untuk saat ini undang-undang tersebut telah di ubah menjadi Undang-Undang cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020.

ABSTRACT

Ervin Widi Saputra, 12103183146, Disharmony in the Regulation of Criminal Sanctions for Forest Burning Between Law Number 39 of 2014 concerning Plantations and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Constitutional Law Study Programme, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Tulungagung State Islamic University 2024, Supervisor Fahmi Arif, S.H., M.H.

Keywords: Disharmony, Forest Burning, Plantation, Environment.

Forests play a very important role in human life, therefore humans really need the products produced by forests. However, recently forests and peat swamps in Indonesia have experienced degradation (a decrease in quality) and deforestation (large-scale commercial logging activities) as well as forest loss due to forest clearing as plantation land in quite large quantities, and even Indonesia is the country with the most severe deforestation rate in the world. One of the causes of forest degradation and deforestation is forest fires. The negative impacts of forest fires that are felt by humans are the reduced benefits of forest potential such as the benefits of trees that can be used as building materials and medicines, as well as the lack of availability of clean and fresh air produced by forest vegetation. Then the loss of forest function as a water system and erosion prevention.

The formulation of the problems in this discussion are:

- 1). How is the disharmonisation of legislation in Law No. 39 of 2014 on Plantations and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management?

2). How is the ideal regulation of criminal sanctions in forest burning activities used as plantation land?

The type of research used by the author in this research is library research. The nature of this research includes normative juridical research. The data collection technique used is documentation technique, which is by collecting written data that has become an institutional or agency document. The research used is library research, which means research conducted using literature, both in the form of record books, as well as research reports from previous studies. Through this method, the author tries to collect the data needed by looking for opinions and theories relevant to the criminal offence of 'Disharmony of Criminal Sanction Arrangements for Land Burning Law Number 39 of 2014 concerning Plantations with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management'.

In this research, the author uses documentation research by examining written data sources, namely: constitutional law books, laws, legal journals and other writings that can be used as references in research.

The results of this study show that;

1). Law Number 39 of 2014 on plantations Article 56 paragraph 1 states 'every plantation business actor is prohibited from clearing land by burning' in paragraph 2 states 'every plantation business actor is obliged to have a land fire control infrastructure system' and in Article 108 states 'every plantation business actor who clears land by burning is subject to a maximum penalty of 10 (ten) years and a maximum fine of 10 (ten) billion'. The law does not specifically explain how the

prohibition of burning forests used as plantation land is regulated, when compared to Law Number 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment Article 69 paragraph 1 letter a states ‘every person is prohibited from committing acts that result in pollution and / or destruction of the environment’ and in Article 69 paragraph 1 letter h states ‘every person is prohibited from clearing land by burning’ then in Article 69 paragraph 2 states ‘the provisions referred to in paragraph (1) letter h pay serious attention to local wisdom in their respective regions’ then in Article 108 states ‘every person who burns land as referred to in Article 69 paragraph 1 letter h. Article 69 paragraph 2 states ‘the provisions referred to in paragraph (1) letter h pay close attention to local wisdom in their respective regions’ then in article 108 states ‘every person who burns land as referred to in article 69 paragraph 1 letter h, shall be punished with a minimum imprisonment of 3 (three) years and a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a fine of at least 3 (three) billion and a maximum fine of 10 (ten) billion’. From this law, it can be seen specifically how the prohibition of burning forests used as plantation land is regulated as well as the determination of minimum and maximum criminal sanctions against offenders.

2). When viewed from the functions and objectives of the two laws, Law Number 39 of 2014 Article 56 paragraph 1 jo Article 108 concerning plantations is still less relevant if used as a legal basis for imposing sanctions on perpetrators of forest burning violations used as plantation land. Meanwhile, Law Number 32 of 2009 article 69 paragraph 1 letter a and letter h and article 69 paragraph 2 jo article 108 concerning Environmental Protection and Management, is still better used as a

legal basis for imposing criminal sanctions on perpetrators of violations, which for now the law has been amended to work copyright Law Number 11 of 2020.